

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari provinsi, dan provinsi terdiri dari kabupaten dan kota, setiap provinsi memiliki pemerintah daerahnya sendiri. Guna mempermudah pengelolaan pemerintahan daerahnya masing-masing, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Indonesia.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikumpulkan di daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan pemerintah dari Pendapatan Asli Daerah ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pemerintah daerah maka akan semakin banyak pula pembangunan perekonomian yang terjadi di daerah tersebut. Hal ini terlihat dari perolehan sarana dan prasarana

yang mendukung prasarana umum, seperti jalan raya, penerangan jalan, dan lainnya (Widanta, 2011).

Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbanyak, dan juga pusat kegiatan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Pulau Jawa sebesar 151,59 juta penduduk dari jumlah penduduk Indonesia yang memiliki total 270,20 juta jiwa. Ada beberapa daerah atau provinsi di Pulau Jawa yang memiliki sumbangan Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Setiap provinsi di Pulau Jawa memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda. Perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut karena adanya potensi dan kondisi setiap daerahnya berbeda. Berikut ini data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pulau Jawa tahun 2015-2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah penulis

Gambar 1. 1 Grafik Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Pulau Jawa 2015-2020 (Dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan grafik diatas, Pendapatan Asli Daerah di Pulau Jawa setiap provinsinya terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya, DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi

dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi D.I. Yogyakarta dalam 6 tahun terakhir, dari tahun 2015 hingga 2020 memiliki Pendapatan Asli Daerah terendah diantara provinsi lain di pulau Jawa. Besaran Pendapatan Asli Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2020 tepatnya saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia tidak hanya Pendapatan Asli Daerah D.I. Yogyakarta yang mengalami penurunan tetapi keseluruhan Provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan semua. Meskipun D.I. Yogyakarta mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang sudah cukup baik dari tahun ke tahun, namun tetap sulit untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah di Pulau Jawa, tidak hanya Pendapatan Asli Daerah D.I. Yogyakarta yang menjadi urutan paling bawah, bahkan jumlah penduduknya juga menjadi urutan paling bawah di Pulau Jawa.

Jumlah penduduk tertinggi di Pulau Jawa ditahun 2020 yaitu Jawa Barat dengan total 47,59 juta jiwa, sedangkan diurutkan kedua diduduki oleh Jawa Timur dengan jumlah penduduk 40,99 juta jiwa, selanjutnya disusul oleh Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sebesar 37,23 juta jiwa, kemudian urutan selanjutnya ada Provinsi Banten dengan jumlah 11,90 juta jiwa, lalu di urutan kelima ada DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 11,27 juta jiwa, dan pada urutan terakhir yaitu D.I. Yogyakarta yang hanya memiliki jumlah penduduk sebanyak 3,6 juta jiwa. Dengan adanya jumlah penduduk yang cukup tinggi maka daerah tersebut akan menghasilkan konsumsi rumah tangga yang tinggi juga. Tidak hanya kedua faktor tersebut yang menjadi masalah dalam kenaikan Pendapatan Asli Daerah, begitu juga dengan daya tarik investor terhadap daerah tersebut, dimana para investor

akan lebih banyak menanamkan modalnya pada provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak karena memiliki konsumsi yang tinggi.

Sebelum pandemi Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki potensi yang cukup baik dalam melaksanakan fungsi otonomi daerah, salah satunya Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pemasukan yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan daerah. D.I Yogyakarta memiliki berbagai macam budaya, kreativitas dan inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa apa pun yang dapat dibuat memiliki nilai uang yang dapat dijual kepada masyarakat umum, dan dapat menarik perhatian masyarakat domestic maupun mancanegara. Oleh karena itu, semua industri yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini diharapkan dapat memenuhi target yang telah ditentukan, khususnya Pendapatan asli daerah (PAD).

Dimasa pandemi ini, adanya penurunan pendapatan daerah D.I. Yogyakarta yaitu pada tahun 2020 turun sebesar 2 %, yang dimana pada tahun 2019 memiliki pendapatan daerah sebesar 5.699.357 turun menjadi 5.611.511 di tahun 2020. Dalam RAPBD, Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dimasa pandemi ini, yaitu mengalami penurunan sebesar 10%. Dimana Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah menjadi faktor penurunan tertinggi dalam Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 49%, dan kedua retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 14%. Data RAPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
RAPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2020 (Jutaan)

No	Sub Elemen	Tahun		Selisih	%
		2019	2020		
1	Pendapatan Daerah	5.699.357	5.611.511	-87.846	-2%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.082.795	1.876.707	-206.089	-10%
1.1.1	Pajak Daerah	1.773.941	1.646.559	-127.381	-7%
1.1.2	Retribusi Daerah	42.420	36.546	-5.874	-14%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	85.961	101.460	15.500	18%
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	180.474	92.141	-88.333	-49%
1.2	Dana Perimbangan	2.385.703	2.371.044	-14.659	-1%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56.061	114.277	58.217	104%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.351.102	1.227.648	-123.454	-9%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	978.540	1.029.119	50.579	5%
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.230.859	1.362.980	132.121	11%
1.3.1	Hibah	8.343	8.349	-199	-2%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.221.604	1.354.630	133.026	11%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	706	706	-	0%

Sumber: bappeda jogjapro

Sejalan dengan adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah ini yang dikarenakan adanya faktor pandemi Covid-19, secara otomatis pandemi juga akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi penduduk, sehingga jumlah penduduk menjadi masalah terhadap Pendapatan Asli Daerah D.I. Yogyakarta, dikarenakan adanya penduduk yang tidak bekerja, di PHK, dan pemotongan gaji, sehingga mengalami penurunan jumlah penduduk yang produktif, maka hal ini akan berpengaruh pada konsumsi dan investasi. Sehingga jika konsumsi dan investasi mengalami penurunan akan mempengaruhi pendapatan daerah. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk dapat menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian

secara keseluruhan. Dengan adanya jumlah penduduk yang dimana setiap tahunnya pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan.



Sumber: BPS DIY, 2021 (Data diolah)

Gambar 1. 2 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk, Konsumsi Rumah Tangga, Dan Investasi DIY Tahun 2015-2020 (Dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan data diatas perkembangan penduduk D.I Yogyakarta terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2015 hingga 2020. Dalam penelitian Asmuruf, M. (2015) Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu berarti dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka PAD akan meningkat.

Konsumsi rumah tangga juga menjadi pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini, rumah tangga bertindak sebagai pengguna akhir (permintaan akhir) dari berbagai barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Badan Pusat Statistik, 2019). Menurut Prana (2019) dalam

penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat atau konsumsi akan mempengaruhi pajak secara signifikan. Konsumsi masyarakat berupa makanan dan non makanan akan dikenakan pajak, baik pajak yang dikenakan pada konsumsi makanan maupun pajak yang dikenakan pada non makanan. Pajak merupakan sumber pendapatan yang terbesar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung jika konsumsi masyarakat meningkat akan meningkatkan pajak daerah dan sebaliknya.

Berdasarkan data diatas, konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan mulai dari tahun 2015 hingga 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi yang sudah mulai menyebar di D.I. Yogyakarta, bahkan daerah-daerah lain. Akibatnya masyarakat mengalami pengurangan terhadap pengeluaran dikarenakan pendapatan mengalami penurunan, begitu juga karena keterbatasan untuk melakukan kegiatan atau bekerja secara normal.

Selain kedua pengaruh diatas ada juga faktor yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah yaitu investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapat keuntungan di masa-masa yang akan datang. Menurut Priyono, (2016) Investasi merupakan suatu masalah yang langsung berhubungan dengan besarnya pengharapan akan pendapatan dari barang modal dimasa depan. Pengharapan akan pendapatan masa depan inilah faktor yang penting penentuan besarnya investasi.

Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Penanaman Modal adalah segala jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam dan luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah dapat menggalang dana tambahan melalui investasi tersebut, yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah. Dalam penelitian ini yang dimaksud investasi yaitu penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Perseorangan yang merupakan penduduk Indonesia, badan hukum Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau daerah yang menanamkan modalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap sebagai penanam modal dalam negeri. Menurut Ririn, Prihatni, & Murdayanti (2014) menyatakan bahwa investasi dapat menciptakan banyak pekerjaan dan mengatasi keterbelakangan teknologi.

Berdasarkan data yang tertera diatas dapat diketahui bahwa perkembangan nilai investasi D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2015 hingga 2019, lalu setelah itu pada tahun 2020 nilai investasi D.I. Yogyakarta mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya dampak pandemi terhadap investasi. Menurut Nasution, Erlina & Muda (2020) pandemi COVID-19 juga berdampak negatif terhadap investasi, sehingga membuat investor menjadi sangat berhati-hati dalam membeli barang atau melakukan investasi.

Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang mulai terjadi sejak pertengahan Maret 2020 membawa perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk dalam waktu yang relatif singkat. Pendapatan Asli Daerah

D.I. Yogyakarta sebelum pandemi terus mengalami kenaikan cukup baik, namun setelah pandemi Covid-19 PAD D.I. Yogyakarta mengalami perubahan yang cukup tinggi dengan penurunan 10%. Dengan adanya masalah ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah pendapatan asli daerah sehingga judul yang diambil ini tentang “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Konsumsi Rumah Tangga, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di D.I. Yogyakarta Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a) Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di D.I. Yogyakarta?
- b) Apakah konsumsi rumah tangga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di D.I. Yogyakarta?
- c) Apakah Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di D.I. Yogyakarta?
- d) Apakah sebelum dan setelah Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di D.I. Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a) Untuk menganalisis mengenai pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di D.I. Yogyakarta.

- b) Untuk menganalisis mengenai pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di D.I. Yogyakarta.
- c) Untuk menganalisis mengenai pengaruh investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di D.I. Yogyakarta.
- d) Untuk mengetahui pengaruh sebelum dan setelah Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah di D.I. Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

a) Bagi Penulis

Dalam penelitian ini manfaat bagi penulis yaitu sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan keuangan daerah dan kaitannya dengan pembangunan daerah otonom dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Srata Satu di Universitas Amikom Yogyakarta pada program studi Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta.

b) Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga ke depan daerah otonom dapat memanfaatkan hasil sumber pendanaan dan kekayaan daerahnya masing-masing untuk membangun dan mengembangkan daerahnya. Pemerintah daerah tidak lagi mengandalkan pemerintah pusat, setidaknya bisa diminimalisir dan menjadi lebih mandiri.

c) Bagi Akademisi

Sebagai referensi mahasiswa dalam melakukan penelitian dan memberikan informasi tentang penelitian mengenai jumlah penduduk, konsumsi rumah tangga, investasi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d) Bagi Pembaca

Sebagai referensi ataupun literatur bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama, tetapi dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda mengenai Pendapatan Asli Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi:

- a. Landasan teori memuat beberapa teori yang berisi tentang pembahasan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk, konsumsi rumah tangga, investasi, dan perbedaan sebelum dan setelah pandemi.
- b. Berisi tentang hasil-hasil penelitian yang terdahulu mengenai atau berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan tehnik analisis data. Mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis pengaruh jumlah penduduk, konsumsi rumah tangga, dan investasi terhadap pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari penyajian serta penjelasan hasil olah data secara rinci, serta pembahasan hasil penelitian berisi tentang interpretasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh jumlah penduduk, konsumsi rumah tangga, dan investasi terhadap pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada dalam penelitian serta hasil dari penelitian yang telah diselesaikan. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.